

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ahmad Sobana, *Adaptasi Pelayanan Izin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985
- Asep Warlan Yusuf, *Hukum Perizinan Bisnis*, Pasca Sarjana Hukum, Unpar, Bandung, 2000
- B Arif Sidarta dkk, *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya, Bandung, 1997
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- _____, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Amrico, Bandung, 1997
- D.J Elzinga, *De Democratische Restsstaat*, Als Ontwikkeling Perspectif, dikutip dalam Bagir manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- David Osborne dan Peter Plasterik, *Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terjemahan Abdul Rosyid, PPM, Jakarta, 2004
- Deno Kamelus, *Fungsi Hukum Terhadap Ekonomi di Indonesia*, Airlangga, Surabaya, 1998
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007

- Ibnu Tricahyono, *Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik*, YAPPIKA, Jakarta, 2006
- Indoharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- J.B. Kristiadi, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, LAN, Jakarta, 1996
- Koentjoro Purbopronoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Lily Rasydi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993
- Mahfuda MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998
- Marcus Luqman, *Freies Ermessen dalam Proses dan Pelaksanaan Rencana Kota (penelitian di Kodya Pontianak)*, Tesis, Unpad, 1989
- Martin Albrow, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989
- Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- _____, *Fungsi dan Perkembangan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1990
- Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Alumni, Bandung, 2007
- Philipus M Hadjon, *Penghantar Hukum Perizinan*, Yusidika, Surabaya, 1993
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Jakarta, 2003
- S. Reksopoetranto, *Aspek Birokrasi dalam Menghadapi Tantangan Liberalisasi Tahun 2020*, Gramedia, Jakarta, 1995
- Salim Hs dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Sjachran Basah, *Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH Unair, Surabaya, 1995
- _____, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- S.P Siagian, *Patologi Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sunayarti Hartono, *Beberapa Pikiran Mengenai Suatu Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Utrecht, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1996

B. Makalah atau Surat Kabar

- A Hamid S Atamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Kebijakan*, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTK ke 46, Jakarta, 1972
- Asep Warlan, *Penyederhanaan Perizinan, Analisi Hukum dan Perundang-undangan*, disampaikan pada Seminar Reformasi Birokrasi Melalui Deregulasi dan Debirokratisasi Perizinan di Kota Bandung, Bandung, 2008

Ateng Syarifudin, *Asas-asas Pemerintahan yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 11 Mei 1991

Bagir Manan, *Peranan hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, FH UNHAS, 31 Agustus, 1995

Edi Siswadi, *Menata Birokrasi Pemerintahan Daerah*, Pikiran Rakyat, 2007

Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Hukum*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH, Jakarta 1-2 Mei 1996

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden No 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik .

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

D. Sumber Lain

<http://www.depdagri.go.id>

<http://www.bandung.go.id>

<http://www.komisihukum.go.id>

<http://www.transparansi.or.id>

<http://www.legalitas.org>